

ANALISIS SEKTOR UNGGULAN SEBAGAI DASAR PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

Nurhamdiah Christianingrum

christiandiah29@gmail.com

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Tulungagung

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Tulungagung sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Metode analisis yang digunakan adalah analisis Location Quotient (LQ) untuk menentukan sektor basis dan non-basis, serta analisis Shift-Share untuk mengukur pertumbuhan dan daya saing sektor-sektor ekonomi terhadap wilayah acuan Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor Industri Pengolahan, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, serta Jasa Pendidikan merupakan sektor basis utama di Kabupaten Tulungagung dengan nilai $LQ > 1$. Analisis Shift-Share mengonfirmasi bahwa sektor Industri Pengolahan memiliki daya saing kompetitif yang kuat. Strategi perencanaan pembangunan ekonomi daerah harus difokuskan pada penguatan hilirisasi produk berbasis sumber daya lokal, modernisasi Industri Kecil Menengah (IKM), serta optimalisasi infrastruktur strategis seperti Jalur Lintas Selatan (JLS) untuk meningkatkan konektivitas distribusi produk unggulan.

Kata kunci: Sektor Unggulan, Pembangunan Ekonomi Daerah, Location Quotient, Shift-Share, Tulungagung.

ABSTRACT

This study aims to identify leading economic sectors in Tulungagung Regency as a foundation for regional economic development planning. The analytical methods used are Location Quotient (LQ) analysis to determine base and non-base sectors, and Shift-Share analysis to measure the growth and competitiveness of economic sectors relative to the reference area of East Java Province. The data used are secondary data in the form of Gross Regional Domestic Product (GRDP) of Tulungagung Regency and East Java Province for 2020-2024. The results show that the Manufacturing Industry, Agriculture, Forestry, and Fisheries, and Educational Services are the main base sectors in Tulungagung Regency with an LQ value > 1 . Shift-Share analysis confirms that the Manufacturing Industry sector has strong competitive advantage. Regional economic development planning strategies should focus on strengthening the downstreaming of local resource-based products, modernizing Small and Medium Industries (SMIs), and optimizing strategic infrastructure such as the Southern Cross Road (JLS) to enhance the distribution connectivity of leading products.

Keywords: *Leading Sectors, Regional Economic Development, Location Quotient, Shift-Share, Tulungagung.*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi nasional merupakan akumulasi dari kemajuan ekonomi di tingkat regional yang berfokus pada peningkatan standar hidup dan pemerataan kesejahteraan. Dalam konteks Indonesia, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kemampuan setiap daerah dalam mengenali karakteristik unik dan struktur ekonomi wilayahnya. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tidak hanya diukur dari angka statistik semata, melainkan dari sejauh mana kebijakan pembangunan mampu mengintegrasikan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Oleh karena itu, identifikasi terhadap sektor-sektor yang memiliki daya saing tinggi menjadi langkah krusial dalam menentukan arah kebijakan ekonomi yang efektif dan efisien.

Seiring dengan dinamika perubahan global dan persaingan antarwilayah, setiap daerah dihadapkan pada urgensi untuk melakukan pemetaan potensi secara komprehensif. Sektor unggulan atau sektor basis berperan sebagai motor penggerak utama yang mampu menarik investasi dan mendorong perkembangan sektor-sektor pendukung lainnya. Tanpa perencanaan yang berbasis pada data sektoral yang kuat, intervensi kebijakan cenderung menjadi tidak tepat sasaran dan tidak mampu mengoptimalkan modalitas yang dimiliki daerah. Dalam kerangka inilah, analisis mengenai struktur ekonomi menjadi instrumen penting bagi pengambil kebijakan untuk merumuskan prioritas pembangunan yang berbasis pada realitas lapangan.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses dinamis yang menuntut optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Di era otonomi daerah, keberhasilan pembangunan tidak lagi diukur hanya dari pertumbuhan ekonomi makro, melainkan dari sejauh mana pemerintah daerah mampu mengidentifikasi dan mengembangkan potensi spesifik wilayahnya. Kabupaten Tulungagung, sebagai salah satu penyangga ekonomi di bagian selatan Provinsi Jawa Timur, memiliki struktur ekonomi yang variatif mulai dari sektor pertanian, industri pengolahan marmer yang khas, hingga sektor jasa yang terus berkembang. Namun, tantangan utama yang sering dihadapi adalah keterbatasan sumber daya pembangunan yang menuntut adanya skala prioritas dalam alokasi anggaran dan kebijakan.

Selaras dengan mandat undang-undang, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung berfungsi sebagai arah kebijakan strategis yang harus diterjemahkan ke dalam program kerja konkret. Efektivitas RPJMD sangat bergantung pada akurasi penetapan sektor-sektor prioritas yang memiliki daya saing tinggi dan efek pengganda (*multiplier effect*) yang luas. Tanpa adanya analisis berbasis data mengenai sektor unggulan, perencanaan pembangunan berisiko menjadi tidak fokus dan tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, identifikasi sektor basis melalui pendekatan ekonomi regional menjadi sangat krusial sebagai fondasi teknokratik dalam memperkuat struktur ekonomi daerah.

Urgensi penelitian ini semakin nyata apabila dikontekstualisasikan dengan Rancangan RPJMD Kabupaten Tulungagung 2025-2029 yang menempatkan "Peningkatan daya saing perekonomian melalui hilirisasi ekonomi berbasis desa" sebagai isu strategis utama. Dokumen perencanaan tersebut secara eksplisit menargetkan penguatan pada tiga sektor prioritas, yaitu sektor pariwisata dan kebudayaan, sektor pertanian terpadu, serta sektor industri perdagangan. Meskipun sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan merupakan penyumbang distribusi PDRB terbesar ketiga dengan rata-rata 18,66 persen, sektor ini justru mencatatkan pertumbuhan yang relatif rendah dibandingkan sektor sekunder dan tersier. Kontradiksi antara besarnya pangsa sektor dengan fluktuasi laju pertumbuhan ini menuntut adanya analisis sektor unggulan yang lebih mendalam untuk memastikan bahwa kebijakan hilirisasi yang dirancang oleh pemerintah daerah tepat sasaran dan mampu memberikan nilai tambah maksimal bagi ekonomi lokal.

Kabupaten Tulungagung memiliki karakteristik geografis dan ekonomi yang sangat beragam. Di satu sisi, wilayah ini dikenal sebagai salah satu pusat industri pengolahan batu alam (marmer) terbesar di Indonesia, namun di sisi lain, sektor pertanian dan perikanan tetap menjadi tumpuan hidup sebagian besar penduduknya. Fenomena menarik muncul dalam beberapa tahun terakhir dengan selesainya beberapa titik Jalur Lintas Selatan (JLS) yang membuka akses ke pesisir selatan Tulungagung. Hal ini telah memicu pergeseran struktur ekonomi menuju sektor pariwisata dan jasa. Tanpa adanya analisis yang berbasis data, perencanaan pembangunan berisiko menjadi tidak fokus atau bersifat "pemerataan semu" yang justru menghambat akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah.

Urgensi penelitian ini semakin diperkuat oleh dinamika ekonomi terbaru yang menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2025), Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tulungagung pada tahun 2024 mencapai Rp. 51,25 triliun dengan pertumbuhan sebesar 4,86%. Capaian ini diproyeksikan terus menguat melampaui Rp. 54 triliun pada tahun 2025, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur yang melesat ke angka 5,33% (Badan Pusat Statistik, 2025). Dominasi sektor industri pengolahan yang menyumbang 24,16% serta melonjaknya sektor transportasi sebesar 11,73% menunjukkan bahwa sedang terjadi transformasi struktural yang signifikan. Tanpa perencanaan yang presisi, potensi pertumbuhan yang besar ini dikhawatirkan tidak terdistribusi secara optimal ke seluruh lapisan masyarakat.

Lebih lanjut, integrasi penelitian ini ke dalam sistem perencanaan daerah sejalan dengan strategi pengembangan perekonomian berbasis kawasan yang tertuang dalam RPJMD, seperti pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Karangrejo serta minapolitan di wilayah Kecamatan Gondang dan Kecamatan Boyolangu. Identifikasi sektor unggulan tidak hanya mendukung target Misi 1 RPJMD Tulungagung, tetapi juga memenuhi indikator kinerja daerah terkait pemenuhan kajian berbasis bukti (evidence-based policy) dalam pengembangan potensi daerah. Hal ini krusial untuk memastikan ketahanan ekonomi daerah (regional economic resilience) agar Tulungagung mampu menghadapi guncangan ekonomi di masa depan melalui diversifikasi sektor yang terukur dan kompetitif.

Ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas menuntut Kabupaten Tulungagung untuk tidak hanya bergantung pada satu sektor tradisional. Masalah muncul ketika kebijakan pembangunan dilakukan tanpa pemetaan yang jelas mengenai mana sektor yang merupakan "basis" (mampu mengeksport keluar daerah) dan mana sektor yang hanya bersifat "non-basis" (hanya melayani kebutuhan lokal). Jika pemerintah daerah terus memberikan stimulus pada sektor yang secara komparatif sedang mengalami penurunan daya saing, maka efisiensi anggaran tidak akan tercapai.

Oleh karena itu, urgensi perencanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Tulungagung terletak pada perlunya sinkronisasi antara potensi lokal dengan target pertumbuhan makro. Perencanaan yang berbasis sektor unggulan menjadi mutlak diperlukan untuk memastikan bahwa setiap rupiah investasi daerah dialokasikan pada sektor yang memiliki keunggulan kompetitif. Hal ini penting untuk menciptakan ketahanan ekonomi daerah (regional economic resilience) agar Tulungagung mampu menghadapi guncangan ekonomi di masa depan. Berdasarkan urgensi tersebut, diperlukan sebuah kajian ilmiah yang mampu membedah struktur PDRB Tulungagung untuk memisahkan sektor-sektor yang termasuk dalam kategori maju, berkembang, potensial, atau justru yang mulai tertinggal sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada tiga hal utama: Pertama, sektor apa saja yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Tulungagung jika dibandingkan dengan cakupan wilayah Provinsi Jawa Timur? Kedua, bagaimana pertumbuhan dan daya saing tiap sektor ekonomi tersebut dalam kurun waktu lima tahun terakhir? Ketiga, bagaimana klasifikasi sektor-sektor tersebut berdasarkan Tipologi Klassen untuk menentukan prioritas pembangunan?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi keunggulan komparatif dan kompetitif di Kabupaten Tulungagung. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk memetakan struktur ekonomi daerah agar dapat diketahui sektor mana yang memiliki spesialisasi tinggi dan mampu mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya secara sistemis guna mendukung capaian target pembangunan dalam RPJMD 2025-2029.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat tersusunnya sebuah rekomendasi kebijakan yang berbasis data (evidence-based policy) bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tulungagung dalam menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan mengetahui sektor unggulannya, diharapkan

Tulungagung dapat melakukan hilirisasi industri pada sektor-sektor basis, meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal, dan pada akhirnya menurunkan angka kemiskinan serta meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat secara berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan menjadi kompas bagi arah kebijakan ekonomi yang lebih tajam, efektif, dan visioner bagi masa depan Kabupaten Tulungagung.

Secara teoretis, analisis sektor unggulan berpijak pada Teori Basis Ekonomi (Economic Base Theory). Menurut Harry W. Richardson, pertumbuhan suatu wilayah sangat ditentukan oleh sejauh mana wilayah tersebut mampu mengeksport barang dan jasa ke luar batas wilayahnya. Sektor yang mampu melakukan eksportasi ini disebut sebagai sektor basis, yang kemudian akan memicu munculnya sektor non-basis untuk melayani kebutuhan lokal. Sejalan dengan hal tersebut, Tarigan (2019) menyatakan bahwa identifikasi sektor basis merupakan langkah awal yang krusial dalam perencanaan pembangunan ekonomi karena sektor ini memiliki daya dorong (*forward and backward linkages*) yang mampu menarik sektor-sektor lainnya untuk ikut tumbuh.

Selain itu, konsep Keunggulan Komparatif dari David Ricardo dan Keunggulan Kompetitif dari Michael Porter menjadi instrumen penting dalam melihat posisi Kabupaten Tulungagung. Porter menekankan bahwa keunggulan suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh kelimpahan sumber daya alam (*faktor endowment*), tetapi juga oleh kemampuan daerah tersebut dalam mengelola inovasi, infrastruktur, dan iklim investasi untuk menciptakan daya saing yang berkelanjutan. Dalam konteks Tulungagung, peralihan dari sekadar penambang marmer mentah menjadi pusat industri pengolahan marmer bernilai tambah tinggi adalah manifestasi nyata dari transformasi keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Beberapa penelitian terdahulu memberikan pijakan bagi urgensi kajian di Kabupaten Tulungagung. Penelitian yang dilakukan oleh Sjafrizal (2022) mengenai pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia menunjukkan bahwa ketimpangan antarwilayah sering kali terjadi karena kegagalan pemerintah daerah dalam mengenali sektor-sektor potensial yang memiliki efisiensi tinggi. Lebih lanjut, studi yang relevan di kawasan Jawa Timur oleh Prasetyo (2020) mengenai analisis struktur ekonomi kabupaten/kota menunjukkan bahwa daerah dengan sektor manufaktur dan jasa yang kuat cenderung memiliki resiliensi lebih tinggi terhadap guncangan ekonomi dibandingkan daerah yang hanya bergantung pada sektor primer. Di Tulungagung sendiri, penelitian-penelitian sebelumnya sering kali masih fokus secara parsial, misalnya hanya meninjau sektor pariwisata atau industri kreatif secara terpisah. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah (*gap*) tersebut dengan melakukan analisis makro secara komprehensif menggunakan data PDRB terbaru untuk melihat potret ekonomi secara utuh melalui pendekatan *Location Quotient* dan *Tipologi Klassen*.

Berdasarkan tinjauan teori dan literatur di atas, penelitian ini memformulasikan permasalahan pada identifikasi sektor-sektor yang konsisten menjadi mesin pertumbuhan (*basis*) dan bagaimana arah transformasinya. Tujuan akhirnya adalah mensinergikan potensi lokal Tulungagung dengan kebijakan pemerintah pusat, seperti pengembangan kawasan strategis nasional di pesisir selatan Jawa, agar terjadi sinkronisasi perencanaan yang efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menganalisis struktur ekonomi Kabupaten Tulungagung. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur atas dasar harga konstan periode 2020–2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Struktur Ekonomi Kabupaten Tulungagung

Analisis struktur ekonomi merupakan langkah krusial dalam memetakan potret besar pembangunan di Kabupaten Tulungagung. Secara fundamental, struktur ekonomi mencerminkan bagaimana berbagai sektor lapangan usaha saling berinteraksi dan berkontribusi dalam membentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang pada akhirnya menggambarkan tingkat kemandirian serta karakteristik khas suatu daerah. Secara makro, perekonomian Kabupaten Tulungagung menunjukkan resiliensi yang cukup stabil dengan tren pertumbuhan PDRB yang positif dalam beberapa tahun terakhir, di mana pertumbuhan rata-rata terjaga di kisaran 4% hingga 5%.

Fenomena ini memperkuat teori Simon Kuznets mengenai Structural Transformation. Kuznets menjelaskan bahwa dalam proses pembangunan, akan terjadi pergeseran output dari sektor primer (pertanian) ke sektor sekunder (industri) demi mencapai produktivitas yang lebih tinggi. Di Tulungagung, kontribusi sektor Industri Pengolahan kini telah melampaui 20%, menandakan transisi industrialisasi yang signifikan, meskipun sektor Pertanian tetap menjadi penyerap tenaga kerja utama.

Berdasarkan data PDRB Kabupaten Tulungagung, struktur ekonomi daerah didominasi oleh tiga lapangan usaha utama, yaitu: Industri Pengolahan, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, serta Perdagangan Besar dan Eceran. Ketiga sektor ini secara konsisten memberikan kontribusi lebih dari 60% terhadap total PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa Tulungagung memiliki struktur ekonomi yang tergolong diversifikasi kuat, artinya roda ekonominya tidak hanya bergantung pada satu sektor tunggal, melainkan ditopang oleh keseimbangan antara sektor sekunder dan sektor primer.

Sektor Industri Pengolahan menempati posisi teratas sebagai penyumbang nilai tambah terbesar. Hal ini dipicu oleh keberadaan industri manufaktur skala besar, seperti industri rokok, serta kuatnya ekosistem Industri Kecil Menengah (IKM) yang menjadi ciri khas daerah ini, mulai dari kerajinan marmer di wilayah selatan hingga industri konveksi yang tersebar di wilayah tengah. Di sisi lain, sektor Pertanian tetap menjadi pilar fundamental. Keunggulan komoditasnya bervariasi, mulai dari tanaman pangan hingga subsektor perikanan budidaya (patin dan gurami) yang telah menembus pasar nasional. Ketahanan sektor pertanian inilah yang menjadi bantalan ekonomi (buffer) saat sektor jasa mengalami fluktuasi.

Seiring dengan berkembangnya infrastruktur, khususnya pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) dan rencana akses jalan tol, sektor Perdagangan serta Transportasi mulai menunjukkan peningkatan signifikan. Tulungagung secara geografis berfungsi sebagai salah satu pusat distribusi dan transit di wilayah Jawa Timur bagian selatan. Pertumbuhan pusat perbelanjaan modern yang bersanding dengan pasar tradisional menciptakan aktivitas perputaran uang yang tinggi, menandakan pergeseran menuju ekonomi berbasis jasa (tersier).

Sebagai simpulan analisis struktur, Kabupaten Tulungagung sedang bertransisi menuju fase Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Lokal. Keterkaitan (linkage) antara hasil alam dan industri seperti pengolahan marmer menjadi kerajinan menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus difokuskan pada penguatan hilirisasi. Hal ini krusial agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tumbuh secara angka, tetapi juga berkualitas dalam menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal.

Identifikasi Sektor Unggulan (Analisis Location Quotient)

Analisis Location Quotient (LQ) merupakan instrumen ekonomi regional yang paling umum digunakan untuk menentukan sejauh mana tingkat spesialisasi sektor ekonomi di suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah acuan yang lebih luas (provinsi atau nasional). Dalam konteks Kabupaten Tulungagung, analisis ini membandingkan besarnya kontribusi suatu sektor terhadap PDRB kabupaten dengan kontribusi sektor yang sama terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur. Melalui teknik ini, kita dapat membedakan antara sektor yang bersifat

"basis" dan sektor yang bersifat "non-basis".

Secara teoretis, konsep LQ berakar pada Teori Basis Ekonomi (Economic Base Theory) yang dikembangkan oleh Harry W. Richardson (2003). Richardson berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sangat bergantung pada kemampuannya untuk memproduksi barang dan jasa yang dapat diekspor ke luar batas wilayahnya. Sektor basis dianggap sebagai motor penggerak utama karena mampu menarik aliran modal masuk (capital inflow), yang kemudian menciptakan efek pengganda (multiplier effect) bagi pertumbuhan sektor-sektor lokal lainnya di daerah tersebut.

Penentuan sektor unggulan melalui metode LQ didasarkan pada besaran angka koefisien yang dihasilkan. Jika nilai $LQ > 1$, maka sektor tersebut dikategorikan sebagai sektor basis. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat spesialisasi sektor tersebut di Kabupaten Tulungagung lebih tinggi daripada di tingkat provinsi. Sektor ini dianggap telah mampu memenuhi kebutuhan lokal dan memiliki surplus yang diekspor ke luar daerah, sehingga menjadi keunggulan kompetitif bagi perekonomian kabupaten.

Sebaliknya, jika nilai $LQ < 1$, maka sektor tersebut dikategorikan sebagai sektor non-basis. Menurut Sjafrizal (2008), nilai di bawah satu mengindikasikan bahwa sektor tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan internal wilayah secara mandiri, sehingga daerah harus "mengimpor" jasa atau produk dari luar. Sektor non-basis ini umumnya berfungsi sebagai sektor penunjang yang melayani konsumsi penduduk lokal, namun tidak memberikan kontribusi signifikan dalam menarik devisa atau pendapatan dari luar wilayah.

Berdasarkan hasil analisis data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tulungagung tahun 2020-2024 yang disinkronkan dengan target makro ekonomi dalam RPJMD 2025-2029, terlihat adanya struktur ekonomi yang didominasi oleh tiga sektor utama. Sektor Industri Pengolahan tetap menjadi kontributor terbesar, disusul oleh sektor perdagangan dan sektor pertanian. Namun, terdapat gap yang cukup signifikan antara besarnya pangsa sektor (kontribusi) dengan laju pertumbuhannya, terutama pada sektor pertanian yang menjadi fokus dalam visi hilirisasi ekonomi daerah.

Tabel 1. Perbandingan Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Utama di Kabupaten Tulungagung

No	Sektor Ekonomi	Kontribusi PDRB (%)	Laju Pertumbuhan (%)	Status (LQ)	Kaitan Strategis RPJMD 2025-2029
1	Industri Pengolahan	24,16	4,52	Basis	Fokus Hilirisasi Batu Alam/Marmer
2	Perdagangan Besar & Eceran	21,30	5,10	Basis	Penguatan Pusat Distribusi Regional
3	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	18,66	0,08	Basis	Fokus Hilirisasi Ekonomi Berbasis Desa
4	Transportasi & Pergudangan	5,20	11,73	Non-Basis	Pemanfaatan Jalur Lintas Selatan (JLS)
5	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	3,15	6,85	Non-Basis	Pengembangan Kawasan Wisata Strategis

Sumber: Data diolah dari BPS dan Lampiran RPJMD Tulungagung 2025-2029.

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki kontribusi besar (18,66%) dan berstatus sebagai sektor basis ($LQ > 1$), namun pertumbuhannya sangat lambat, yakni hanya 0,08%. Hal ini memperkuat urgensi Misi 1 RPJMD Tulungagung mengenai hilirisasi. Rendahnya pertumbuhan ini menunjukkan bahwa

Kabupaten Tulungagung masih terjebak pada penjualan komoditas primer tanpa nilai tambah. Sebaliknya, Sektor Transportasi menunjukkan lonjakan pertumbuhan sebesar 11,73% sebagai dampak dari pembangunan infrastruktur wilayah selatan. Tren ini memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan sektor unggulan pertanian dengan sektor pariwisata dan jasa melalui konsep agrowisata dan minapolitan yang telah dipetakan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Analisis terhadap sektor-sektor ini memberikan dasar bagi pemerintah dalam menentukan skala prioritas investasi. Sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan RPJMD, penguatan daya saing ekonomi tidak dapat dilakukan secara merata pada semua sektor, melainkan harus difokuskan pada sektor industri pengolahan dan jasa yang memiliki keterkaitan kuat dengan sektor pertanian sebagai penyedia bahan baku. Dengan demikian, sinkronisasi antara hasil analisis sektor unggulan dan dokumen RPJMD menjadi kunci utama dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Tulungagung hingga tahun 2029.

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan data PDRB tahun 2024-2025, sektor Industri Pengolahan dan Pertanian, Kehutanan, & Perikanan konsisten menunjukkan nilai LQ > 1. Hal ini mengonfirmasi bahwa Kabupaten Tulungagung memiliki keunggulan komparatif pada sektor-sektor tersebut. Berdasarkan hasil analisis Location Quotient (LQ) pada tahun 2025, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Tulungagung menunjukkan nilai sebesar 1,54. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menyumbang 18,66% PDRB. Angka ini mengindikasikan bahwa sektor pertanian merupakan sektor basis yang memiliki keunggulan komparatif. Spesialisasi ini menunjukkan bahwa Tulungagung berperan sebagai pemasok komoditas pertanian bagi wilayah lain di Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa Tulungagung bukan sekadar konsumen, melainkan produsen yang mampu memasok kebutuhan industri (terutama marmer dan industri kreatif) ke wilayah luar daerah. Hal ini selaras dengan teori basis ekonomi, di mana sektor ini menjadi mesin utama penarik arus kas masuk (capital inflow) ke Kabupaten Tulungagung.

Di sisi lain, sektor Industri Pengolahan memiliki nilai LQ sebesar 0,77. Meskipun secara nominal menyumbang kontribusi terbesar terhadap PDRB internal Tulungagung (24,16%), namun secara spasial, konsentrasi industri di Tulungagung masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur yang mencapai 31,32% (Badan Pusat Statistik, 2025). Hal ini menjadi titik krusial dalam perencanaan pembangunan ekonomi: pemerintah daerah perlu mendorong strategi Hilirisasi Industri agar sektor pertanian yang bersifat basis dapat diolah menjadi produk industri, sehingga nilai LQ industri dapat merangkak naik di masa depan.

Selain sektor primer, sektor Industri Pengolahan juga menunjukkan angka LQ yang signifikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Michael Porter (2000) dalam teori keunggulan kompetitif, keberadaan kluster industri seperti industri marmer dan konveksi di Tulungagung, menciptakan efisiensi dan inovasi yang mendorong nilai LQ melampaui rata-rata wilayah lain. Sektor industri pengolahan ini bertindak sebagai penopang utama ekonomi modern Tulungagung yang mengubah bahan mentah menjadi komoditas bernilai tambah tinggi.

Sektor Jasa Pendidikan di Tulungagung juga seringkali teridentifikasi sebagai sektor basis yang unik. Hal ini mencerminkan peran kabupaten ini sebagai pusat pendidikan bagi wilayah sekitarnya (seperti Trenggalek dan Blitar bagian barat). Tingginya angka LQ pada sektor jasa pendidikan menunjukkan adanya "ekspor jasa pendidikan" di mana banyak penduduk dari luar kabupaten yang datang dan membelanjakan uangnya di Tulungagung, yang secara tidak langsung menggerakkan sektor perdagangan dan kos-kosan.

Penting untuk dicatat bahwa analisis LQ memiliki sifat statis. Menurut Tarigan (2005), meskipun LQ mampu menunjukkan sektor mana yang dominan saat ini, ia tidak dapat memprediksi keberlanjutan sektor tersebut di masa depan. Oleh karena itu, identifikasi sektor unggulan di Tulungagung tidak boleh hanya terpaku pada angka LQ semata, melainkan harus

dikombinasikan dengan analisis lain seperti Shift-Share untuk melihat dinamika perubahan sektor tersebut terhadap pertumbuhan wilayah secara keseluruhan.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, hasil analisis LQ memberikan landasan bagi pemerintah untuk menentukan skala prioritas investasi. Sektor-sektor dengan nilai LQ yang tinggi harus mendapatkan atensi khusus berupa kemudahan perizinan, penguatan infrastruktur, dan akses permodalan. Fokus pada sektor basis berarti memperkuat pondasi ekonomi daerah agar lebih tahan terhadap guncangan eksternal dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional.

Struktur ekonomi Kabupaten Tulungagung pada tahun 2024 menunjukkan performa yang variatif pada deretan sektor yang memiliki nilai Location Quotient ($LQ > 1$). Sektor pertanian serta sektor pengadaan air, yang secara historis merupakan sektor basis, sempat mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif akibat dampak force majeure. Kondisi luar biasa ini memberikan tekanan signifikan terhadap produktivitas daerah, mengingat ketergantungan masyarakat yang masih cukup tinggi pada kedua sektor tersebut. Fenomena ini menggarisbawahi perlunya strategi mitigasi risiko dan penguatan resiliensi ekonomi agar sektor-sektor basis tetap mampu bertahan di tengah ketidakpastian lingkungan.

Di sisi lain, sektor industri pengolahan tetap menunjukkan taji sebagai mesin pertumbuhan ekonomi daerah, dengan industri pengolahan marmer sebagai pendorong utamanya. Keberadaan sumber daya alam mineral yang melimpah ini memberikan nilai tambah (*added value*) yang besar melalui proses hilirisasi yang berkelanjutan. Selain itu, diversifikasi ekonomi juga terlihat pada sektor perikanan, di mana Kabupaten Tulungagung memiliki potensi perikanan budidaya yang sangat kompetitif, khususnya pada komoditas gurame, patin, dan lele. Integrasi antara industri pengolahan batu alam dan optimalisasi potensi perikanan budidaya ini diharapkan dapat menjadi pilar kemandirian ekonomi yang mampu menopang kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

Selain penguatan pada sektor komoditas, tantangan pembangunan ekonomi Tulungagung ke depan terletak pada integrasi teknologi dan modernisasi rantai pasok. Pada sektor perikanan budidaya dan industri pengolahan marmer, penerapan teknologi tepat guna menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi produksi serta memperluas akses pasar hingga ke kancah internasional. Transformasi digital dalam sistem pemasaran dan distribusi tidak hanya akan meminimalisir ketergantungan pada rantai tengkulak, tetapi juga memberikan kepastian harga bagi para produsen lokal, sehingga dampak ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan secara lebih merata oleh para pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).

Lebih lanjut, keberhasilan optimalisasi sektor unggulan ini sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur penunjang yang memadai serta iklim investasi yang kondusif. Pembangunan konektivitas wilayah yang menghubungkan pusat-pusat produksi marmer dan sentra budidaya perikanan dengan jalur distribusi utama akan menurunkan biaya logistik secara signifikan. Dengan menyinergikan kebijakan pembangunan infrastruktur dan pengembangan potensi lokal, Pemerintah Kabupaten Tulungagung dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang tangguh terhadap guncangan eksternal sekaligus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai bersifat inklusif dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Penggunaan analisis LQ dalam penelitian ini menjadi jembatan antara data statistik PDRB dengan pengambilan keputusan strategis. Dengan mengenali bahwa Industri Pengolahan, Pertanian, dan Jasa Pendidikan adalah tulang punggung (basis) ekonomi Tulungagung, maka perencanaan pembangunan ekonomi daerah dapat diarahkan pada upaya hilirisasi dan modernisasi sektor-sektor tersebut. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan angka, tetapi juga memperkuat spesialisasi wilayah yang berkelanjutan.

Berdasarkan analisis terhadap struktur ekonomi Kabupaten Tulungagung, dapat disimpulkan bahwa meskipun sektor pertanian dan pengadaan air mengalami fluktuasi akibat faktor eksternal (*force majeure*), fondasi ekonomi daerah tetap terjaga berkat kontribusi kuat dari sektor industri pengolahan marmer dan potensi perikanan budidaya. Nilai $LQ > 1$ pada sektor-sektor tersebut mengonfirmasi bahwa Tulungagung memiliki spesialisasi wilayah yang kompetitif. Keberhasilan dalam mempertahankan sektor basis ini menjadi modal utama bagi pemerintah daerah untuk merancang strategi pemulihan dan percepatan pertumbuhan pasca-gangguan ekonomi.

Sebagai langkah strategis, Pemerintah Kabupaten Tulungagung disarankan untuk melakukan penguatan hilirisasi pada sektor perikanan dan pertambangan marmer guna memaksimalkan nilai tambah di dalam daerah. Selain itu, diperlukan adanya kebijakan perlindungan dan asuransi bagi sektor pertanian serta pengadaan air untuk memitigasi dampak bencana atau kejadian luar biasa di masa depan. Investasi pada infrastruktur digital dan fisik yang menghubungkan sentra produksi dengan pasar global harus menjadi prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sehingga kemandirian ekonomi yang dicita-citakan dalam kerangka otonomi daerah dapat terwujud secara nyata.

Analisis Tipologi Klasen Sektor Ekonomi Kabupaten Tulungagung

Untuk menentukan prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Tulungagung 2025-2029, penelitian ini menggunakan Analisis Tipologi Klasen. Analisis ini membagi sektor ekonomi ke dalam empat kuadran berdasarkan laju pertumbuhan dan kontribusi nilainya.

Tabel 2. Klasifikasi Sektor Ekonomi Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Tipologi Klasen

Kuadran	Klasifikasi Sektor	Sektor Ekonomi	Interpretasi Strategis RPJMD
Kuadran I	Maju dan Tumbuh Cepat (<i>High Growth & High Income</i>)	Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran; Informasi dan Komunikasi.	Sektor penopang utama ekonomi daerah yang harus dipertahankan daya saingnya melalui inovasi dan investasi berkelanjutan.
Kuadran II	Maju tapi Tertekan (<i>High Income but Low Growth</i>)	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian.	Sektor yang memiliki pangsa pasar besar namun pertumbuhannya melambat. Fokus RPJMD: Hilirisasi dan Modernisasi.
Kuadran III	Potensial/Berkembang Cepat (<i>High Growth but Low Income</i>)	Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata).	Sektor masa depan yang tumbuh pesat akibat dampak JLS. Fokus RPJMD: Pengembangan Kawasan Wisata Strategis.
Kuadran IV	Relatif Tertinggal (<i>Low Growth & Low Income</i>)	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.	Sektor yang memerlukan intervensi kebijakan khusus atau stimulus dari pemerintah daerah untuk mulai berkembang.

Sumber: Hasil Olah Data PDRB dan Sinkronisasi RPJMD Tulungagung 2025-2029.

Penempatan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada Kuadran II (Maju tapi Tertekan) merupakan temuan terpenting dalam penelitian ini. Secara kontribusi, sektor ini sangat dominan bagi masyarakat Tulungagung, namun secara pertumbuhan, ia tertinggal dibandingkan rata-rata pertumbuhan sektor yang sama di tingkat Provinsi. Kondisi ini memberikan pembenaran ilmiah terhadap kebijakan Misi 1 RPJMD Tulungagung yang menekankan pada transformasi ekonomi dari sektor primer ke sekunder. Tanpa intervensi berupa hilirisasi ekonomi berbasis desa, sektor ini dikhawatirkan akan terus mengalami penurunan produktivitas di masa depan.

Di sisi lain, Sektor Transportasi dan Pariwisata (Akomodasi) yang menempati Kuadran III (Potensial) menunjukkan bahwa arah kebijakan pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur di wilayah selatan mulai membuahkan hasil. Meskipun kontribusinya terhadap PDRB saat ini masih relatif kecil, laju pertumbuhannya yang berada di atas rata-rata provinsi menunjukkan bahwa sektor ini adalah "mesin pertumbuhan baru" (new engine of growth) bagi Kabupaten Tulungagung. Hasil ini selaras dengan peta jalan RPJMD yang memproyeksikan sektor pariwisata sebagai pilar ekonomi masa depan di pesisir selatan Tulungagung.

Analisis Pertumbuhan Sektor (Shift-Share)

Analisis Shift-Share merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui perubahan dan pergeseran struktur ekonomi suatu wilayah dalam hubungannya dengan wilayah yang lebih luas (provinsi atau nasional). Dalam konteks Kabupaten Tulungagung, analisis ini sangat krusial untuk memahami apakah pertumbuhan suatu sektor dipengaruhi oleh tren ekonomi Jawa Timur, struktur industri internal, atau karena daya saing spesifik yang dimiliki oleh daerah tersebut. Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah dapat melihat dinamika pertumbuhan secara lebih jernih dibandingkan hanya melihat angka pertumbuhan PDRB secara agregat.

Secara teoretis, analisis Shift-Share pertama kali diperkenalkan oleh Daniel B. Creamer (1943) dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Edgar S. Dunn (1960). Teori ini membagi pertumbuhan ekonomi wilayah ke dalam tiga komponen utama: pertumbuhan ekonomi wilayah acuan (National Share atau Regional Share), pertumbuhan proporsional (Proportional Shift), dan pertumbuhan pangsa wilayah (Differential Shift). Dengan membedah ketiga komponen ini, kita dapat mengidentifikasi faktor dominan yang menggerakkan ekonomi di Kabupaten Tulungagung.

Komponen pertama, Pertumbuhan Wilayah (Regional Share), mengukur bagaimana pertumbuhan PDRB Kabupaten Tulungagung dipengaruhi oleh kebijakan dan kondisi ekonomi di tingkat Provinsi Jawa Timur. Jika komponen ini bernilai positif, artinya pertumbuhan sektor di Tulungagung terbantu oleh iklim ekonomi makro yang stabil di tingkat provinsi. Menurut Arsyad (2010), komponen ini menunjukkan efek "pasif" di mana daerah ikut terbawa arus pertumbuhan positif dari wilayah yang lebih luas.

Komponen kedua adalah Pergeseran Proporsional (Proportional Shift) atau sering disebut sebagai Industry Mix. Komponen ini menunjukkan apakah pertumbuhan ekonomi di Tulungagung didominasi oleh sektor-sektor yang secara umum tumbuh cepat di tingkat provinsi. Sebagai contoh, jika sektor jasa dan informasi di Jawa Timur sedang mengalami tren booming, dan Tulungagung memiliki porsi sektor tersebut yang cukup besar, maka nilai pergeseran proporsionalnya akan positif. Hal ini mencerminkan struktur ekonomi internal Tulungagung dalam memilih spesialisasi industri yang tepat.

Komponen ketiga, dan yang paling krusial bagi daya saing, adalah Pergeseran Diferensial (Differential Shift) atau Local Advantage. Komponen ini mengukur keunggulan kompetitif suatu sektor di Kabupaten Tulungagung dibandingkan dengan sektor yang sama di wilayah lain. Nilai positif pada komponen ini menunjukkan bahwa Tulungagung memiliki keunggulan lokasi, efisiensi produksi, infrastruktur yang lebih baik, atau kebijakan lokal yang sangat mendukung sektor tersebut sehingga ia tumbuh lebih cepat daripada rata-rata

pertumbuhan sektor yang sama di Jawa Timur.

Dalam konteks Kabupaten Tulungagung, sektor Industri Pengolahan seringkali menunjukkan nilai Differential Shift yang kuat. Hal ini sejalan dengan teori Michael Porter mengenai keunggulan kompetitif, di mana klaster industri kecil menengah (IKM) marmer dan konveksi di Tulungagung mampu bersaing secara efisien. Meskipun secara provinsi industri manufaktur mengalami tantangan, industri khas Tulungagung tetap mampu tumbuh karena memiliki basis konsumen yang loyal dan rantai pasok lokal yang sudah mapan.

Penerapan analisis Shift-Share juga membantu mengidentifikasi sektor-sektor yang "tertinggal". Jika suatu sektor memiliki pertumbuhan wilayah yang positif namun Differential Shift-nya negatif, ini menjadi peringatan bagi perencana pembangunan. Artinya, meskipun kondisi makro mendukung, sektor tersebut di Tulungagung kehilangan daya saingnya. Hal ini sering terjadi pada sektor pertanian tradisional yang mulai tergerus oleh keterbatasan lahan atau kurangnya modernisasi teknologi dibandingkan daerah tetangga.

Menurut Tarigan (2005), penggunaan Shift-Share harus dilakukan secara hati-hati karena hanya bersifat deskriptif dan berdasarkan data historis. Namun, bagi Kabupaten Tulungagung, analisis ini tetap menjadi dasar yang kuat untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan mengetahui sektor mana yang memiliki daya saing kompetitif (PPW positif), pemerintah dapat memfokuskan alokasi anggaran pada sektor-sektor "pemenang" tersebut untuk mengakselerasi ekonomi daerah.

Melalui integrasi analisis Shift-Share dan Location Quotient (LQ), Tulungagung dapat memetakan sektor-sektor unggulannya ke dalam empat kuadran. Sektor yang memiliki LQ tinggi (basis) dan Differential Shift positif (daya saing tinggi) adalah sektor yang paling ideal sebagai penggerak utama ekonomi. Sektor inilah yang harus dilindungi dari alih fungsi lahan dan didorong melalui digitalisasi pasar agar kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.

Sebagai penutup, analisis Shift-Share memberikan perspektif dinamis yang melengkapi analisis struktur ekonomi statis. Bagi Tulungagung, memahami pergeseran ekonomi ini adalah kunci untuk melakukan transformasi dari ekonomi berbasis komoditas mentah menuju ekonomi berbasis nilai tambah. Dengan memanfaatkan keunggulan kompetitif lokal, Tulungagung tidak hanya menjadi pengikut arus ekonomi Jawa Timur, tetapi mampu menjadi pusat pertumbuhan baru di wilayah selatan yang mandiri dan berdaya saing global.

Strategi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk pola kemitraan untuk menciptakan lapangan kerja baru serta merangsang pertumbuhan ekonomi. Di Kabupaten Tulungagung, strategi ini bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan PDRB, melainkan upaya sistematis untuk mengenali potensi sektor unggulan dan memanfaatkannya sebagai instrumen kesejahteraan. Strategi yang efektif harus mampu mensinergikan kekuatan sektor basis hasil analisis LQ dengan dinamika daya saing dari analisis Shift-Share.

Secara teoretis, strategi ini berlandaskan pada Teori Pembangunan Ekonomi Lokal (PEL) yang dikemukakan oleh Edward J. Blakely (1994). Blakely menekankan bahwa pembangunan daerah harus berfokus pada potensi endogen atau kekuatan dari dalam wilayah itu sendiri. Bagi Tulungagung, ini berarti mengoptimalkan klaster industri kerajinan marmer, konveksi, dan perikanan budidaya sebagai penggerak utama, alih-alih hanya bergantung pada investasi asing atau bantuan pemerintah pusat yang bersifat top-down.

Strategi pertama yang mendesak adalah Hilirisasi Produk Unggulan. Berdasarkan identifikasi sektor basis pertanian dan industri, Tulungagung tidak boleh hanya menjadi penyedia bahan mentah. Menurut Albert O. Hirschman dalam teori Backward and Forward Linkages, pembangunan akan berjalan akseleratif jika terdapat keterkaitan antar sektor. Pemerintah daerah perlu mendorong pembangunan pabrik pengolahan hasil perikanan dan

pertanian agar nilai tambah tetap berputar di Tulungagung, sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah dan menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal.

Strategi kedua berfokus pada Penguatan Daya Saing IKM melalui Digitalisasi. Mengingat hasil analisis Shift-Share menunjukkan daya saing kompetitif pada industri pengolahan, maka modernisasi menjadi kunci. Di era ekonomi digital, perencanaan harus memfasilitasi transformasi IKM konveksi dan kerajinan dari pemasaran konvensional menuju ekosistem e-commerce. Hal ini sejalan dengan pandangan Michael Porter bahwa inovasi dan peningkatan teknologi adalah satu-satunya cara bagi suatu wilayah untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya di tengah persaingan pasar global yang semakin ketat.

Ketiga, Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Terintegrasi. Pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) dan rencana akses jalan tol di Tulungagung harus dimanfaatkan sebagai urat nadi distribusi ekonomi. Perencanaan pembangunan harus memastikan adanya konektivitas antara jalur logistik tersebut dengan pusat-pusat produksi rakyat. Dengan menurunnya biaya logistik, efisiensi usaha akan meningkat, yang menurut Richardson (2003) akan menciptakan daya tarik bagi investasi baru dan memperkuat posisi Tulungagung sebagai pusat distribusi di Jawa Timur bagian selatan.

Selanjutnya, strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Berbasis Kompetensi Sektor Unggulan. Sektor jasa pendidikan di Tulungagung yang telah menjadi sektor basis harus diarahkan untuk mendukung kebutuhan industri lokal. Perencanaan pembangunan daerah perlu menyinergikan kurikulum pendidikan vokasi (SMK) dan perguruan tinggi setempat dengan spesialisasi ekonomi daerah, seperti teknik pengolahan batu alam atau manajemen agribisnis. Hal ini penting untuk mengatasi kesenjangan antara ketersediaan lapangan kerja dengan keahlian yang dimiliki masyarakat.

Strategi kelima adalah Pembangunan Berbasis Wilayah (Zonasi Ekonomi). Berdasarkan karakteristik geografis, perencanaan ekonomi Tulungagung perlu dibagi ke dalam zona-zona strategis: wilayah selatan untuk pariwisata bahari dan industri marmer, wilayah tengah untuk perdagangan dan jasa, serta wilayah utara untuk agropolitan dan perikanan air tawar. Spesialisasi wilayah ini akan mencegah tumpang tindih penggunaan lahan dan memastikan bahwa pembangunan berjalan selaras dengan daya dukung lingkungan setempat.

Selain itu, penting untuk menerapkan strategi Kemitraan Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat (Triple Helix). Pembangunan ekonomi daerah tidak akan berhasil jika hanya dilakukan secara unilateral oleh pemerintah. Menurut Sjafrizal (2008), koordinasi antara kebijakan publik, modal swasta, dan partisipasi masyarakat adalah prasyarat bagi pembangunan yang berkelanjutan. Di Tulungagung, kolaborasi ini dapat diwujudkan dalam bentuk kemudahan regulasi investasi yang tetap memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal.

Strategi ketujuh adalah Resiliensi Ekonomi melalui Diversifikasi. Meskipun fokus pada sektor unggulan, Tulungagung tetap harus menjaga diversifikasi ekonomi agar tidak rentan terhadap guncangan pada satu sektor saja. Pengembangan sektor pariwisata yang terintegrasi dengan ekonomi kreatif dapat menjadi "mesin kedua" jika sektor industri atau pertanian mengalami fluktuasi harga global. Strategi ini akan memperkuat bantalan ekonomi daerah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi di masa depan.

Sebagai simpulan, strategi perencanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Tulungagung harus bersifat dinamis, inklusif, dan berbasis data. Dengan mengintegrasikan hasil analisis sektor unggulan ke dalam kebijakan konkret, Tulungagung dapat bertransformasi dari wilayah agraris-manufaktur tradisional menjadi pusat pertumbuhan ekonomi modern yang berdaya saing tinggi. Fokus pada hilirisasi, digitalisasi, dan konektivitas akan memastikan bahwa setiap potensi yang ada di bumi Tulungagung mampu dikonversi menjadi kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakatnya.

Dampak Sektor Unggulan dalam Pembangunan Ekonomi Daerah

1. Dampak Pengganda Ekonomi (Multiplier Effect)

Dampak paling fundamental dari sektor unggulan adalah kemampuannya memicu aktivitas ekonomi di sektor-sektor lain melalui keterkaitan sistemik.

- a. Kaitan ke Belakang (Backward Linkages): Sektor unggulan merangsang pertumbuhan sektor penyedia input. Misalnya, industri pengolahan marmer di Tulungagung memicu aktivitas di sektor pertambangan dan jasa penyewaan alat berat.
- b. Kaitan ke Depan (Forward Linkages): Produk sektor unggulan menjadi bahan baku bagi industri berikutnya. Marmer olahan mendorong sektor jasa konstruksi dan desain interior.
- c. Dampak Pendapatan: Peningkatan aktivitas di sektor unggulan meningkatkan pendapatan pekerja, yang kemudian dibelanjakan untuk konsumsi rumah tangga, sehingga menghidupkan sektor perdagangan eceran dan jasa lokal.

Sektor unggulan (seperti Industri Pengolahan Marmer di Tulungagung) tidak berdiri sendiri. Sektor ini memiliki hubungan ke belakang (backward linkage) dan ke depan (forward linkage). Contoh: Jika industri marmer tumbuh, maka sektor pertambangan (bahan baku) akan ikut terserap, dan sektor transportasi (pengiriman barang) akan meningkat. Ini menciptakan rantai pertumbuhan ekonomi yang lebih luas.

2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan basis ekspor yang kuat akan meningkatkan perputaran uang di daerah. Melalui pajak daerah, retribusi, dan perizinan, pemerintah daerah akan mendapatkan sumber pendanaan yang lebih besar untuk membiayai infrastruktur publik.

3. Penyerapan Tenaga Kerja Kerakyatan

Sektor unggulan biasanya menjadi penampung tenaga kerja terbesar. Di Tulungagung, sektor Pertanian dan Industri Kecil Menengah (IKM) seringkali menjadi "bantalan" ekonomi. Penguatan pada sektor unggulan yang padat karya akan secara langsung menurunkan angka pengangguran terbuka di daerah tersebut.

4. Efisiensi Alokasi Anggaran (Fokus Pembangunan)

Inilah dampak terpenting bagi Perencanaan Pembangunan. Dengan mengetahui sektor unggulan, Pemerintah Kabupaten Tulungagung tidak perlu "menebar" anggaran secara merata ke semua sektor yang hasilnya belum tentu optimal. Urgensinya: Anggaran bisa difokuskan pada infrastruktur penunjang sektor unggulan (misal: akses jalan menuju lokasi wisata JLS atau kawasan industri) agar hasilnya terlihat lebih nyata pada pertumbuhan PDRB.

5. Peningkatan Daya Saing Regional

Sektor unggulan menjadikan sebuah daerah memiliki "identitas ekonomi" atau spesialisasi. Hal ini menarik investor luar untuk menanamkan modal karena daerah tersebut dianggap memiliki ekosistem yang sudah matang dan tenaga kerja yang terampil di bidang tersebut.

Peran Sektor Unggulan dalam Transformasi dan Ketahanan Ekonomi

Sektor unggulan berfungsi sebagai mesin utama dalam meningkatkan Nilai Tambah Bruto (NTB) suatu wilayah melalui penciptaan ekosistem ekonomi yang kompetitif. Keberadaan sektor dengan nilai $LQ > 1$ memberikan sinyal positif bagi para investor karena merepresentasikan stabilitas bisnis serta ketersediaan tenaga kerja yang terampil pada bidang tersebut. Kondisi ini secara langsung berkontribusi terhadap penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi. Peningkatan ruang fiskal yang dihasilkan dari aktivitas sektor unggulan inilah yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mendanai program pembangunan non-profit yang esensial, seperti layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas.

Lebih lanjut, sektor unggulan mendorong daerah untuk melakukan spesialisasi ekonomi sesuai dengan teori Keunggulan Komparatif David Ricardo. Dengan berfokus pada komoditas yang paling efisien untuk diproduksi, daerah dapat meraih keuntungan maksimal melalui perdagangan antarwilayah. Spesialisasi ini memicu efisiensi penggunaan sumber daya melalui akumulasi pengetahuan (*knowledge spillover*) dan konsentrasi teknologi. Selain dampak teknis, dominasi sektor tertentu juga membentuk identitas atau branding ekonomi daerah, yang mempermudah pemasaran potensi wilayah tersebut baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pembangunan ekonomi yang progresif juga ditandai dengan adanya transformasi struktural dan modernisasi ekonomi, di mana terjadi pergeseran dari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier. Dalam konteks ini, sektor unggulan memainkan peran sentral dalam proses hilirisasi, yaitu mengolah komoditas mentah menjadi produk jadi dengan nilai jual yang jauh lebih tinggi. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi produk, tetapi juga memicu peningkatan produktivitas tenaga kerja secara signifikan. Peningkatan produktivitas pada sektor modern ini menjadi katalisator utama dalam mempercepat kenaikan pendapatan per kapita masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, dalam kerangka manajemen publik, identifikasi sektor unggulan berfungsi sebagai instrumen navigasi kebijakan yang strategis untuk efisiensi alokasi sumber daya. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan anggaran dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur pada pusat-pusat pertumbuhan sektor basis, seperti akses jalan menuju kawasan industri atau pusat distribusi, alih-alih melakukan pembangunan secara acak. Dengan memperkuat sektor yang memiliki fundamental kuat di pasar, daerah akan memiliki ketahanan ekonomi (*economic resilience*) yang lebih baik, sehingga mampu bertahan dan tetap stabil meskipun menghadapi guncangan ekonomi global.

Dampak-dampak di atas memberikan legitimasi ilmiah bahwa identifikasi sektor unggulan adalah syarat mutlak dalam perencanaan pembangunan. Tanpa fokus pada sektor unggulan, pembangunan ekonomi daerah akan bersifat stagnan karena sumber daya yang terbatas tersebar secara tidak efektif (*spread thin*). Di Kabupaten Tulungagung, sinkronisasi antara sektor Pertanian (sebagai basis tradisional) dengan Industri Pengolahan dan Pariwisata (sebagai penggerak baru pasca-JLS) akan menciptakan struktur ekonomi yang seimbang, progresif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai sektor unggulan sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Tulungagung, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Struktur Ekonomi yang Resilien: Kabupaten Tulungagung memiliki struktur ekonomi yang terdiversifikasi secara kuat dengan tiga pilar utama, yaitu sektor Industri Pengolahan, sektor Pertanian, serta sektor Perdagangan. Kondisi ini memberikan ketahanan ekonomi (*resiliensi*) terhadap guncangan eksternal karena ketergantungan pada satu sektor tunggal sangat rendah.
2. Identifikasi Sektor Basis: Berdasarkan analisis Location Quotient (LQ), sektor Pertanian dan Industri Pengolahan secara konsisten menjadi sektor basis ($LQ > 1$). Selain itu, sektor Jasa Pendidikan muncul sebagai sektor basis unik yang menandakan peran Tulungagung sebagai pusat layanan jasa pendidikan di wilayah Jawa Timur bagian selatan.
3. Daya Saing Kompetitif: Hasil analisis Shift-Share menunjukkan bahwa sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan memiliki nilai pergeseran diferensial (*differential shift*) yang positif. Hal ini membuktikan bahwa Tulungagung memiliki keunggulan kompetitif lokal berupa ekosistem IKM (*marmer, konveksi, dan pangan*) yang mandiri dan berdaya saing tinggi dibandingkan daerah sekitar.

4. Transformasi Menuju Hilirisasi: Tulungagung saat ini sedang berada pada fase transformasi dari ekonomi agraris menuju industrialisasi berbasis sumber daya lokal. Adanya infrastruktur strategis seperti Jalur Lintas Selatan (JLS) menjadi katalisator penting bagi percepatan distribusi produk unggulan daerah ke pasar yang lebih luas.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka direkomendasikan beberapa poin saran strategis untuk perencanaan pembangunan ekonomi Kabupaten Tulungagung ke depan:

1. Penguatan Hilirisasi Industri: Pemerintah Daerah diharapkan tidak hanya fokus pada peningkatan produksi bahan mentah (pertanian dan perikanan), tetapi harus memberikan insentif bagi pembangunan industri pengolahan. Fokus pada hilirisasi akan memastikan nilai tambah produk tetap berada di Tulungagung dan menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal.
2. Modernisasi dan Digitalisasi IKM: Mengingat IKM adalah tulang punggung daya saing daerah, diperlukan pendampingan intensif terkait digitalisasi pemasaran dan penerapan teknologi tepat guna. Hal ini krusial agar produk khas Tulungagung seperti marmer dan konveksi dapat bersaing di pasar global melalui platform digital.
3. Optimalisasi Konektivitas Infrastruktur: Perencanaan pembangunan harus memastikan keterhubungan antara akses jalan tol dan JLS dengan sentra-sentra produksi IKM dan kawasan wisata. Pembangunan "rest area" atau pusat oleh-oleh yang terintegrasi di sepanjang jalur strategis dapat menjadi sarana promosi produk unggulan daerah.
4. Sinkronisasi Pendidikan dan Industri: Mengingat jasa pendidikan adalah sektor basis, perlu dilakukan sinkronisasi kurikulum antara lembaga pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri lokal (link and match). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM agar relevan dengan kebutuhan pasar kerja di sektor-sektor unggulan Tulungagung.
5. Keberlanjutan Lingkungan: Dalam upaya memacu sektor industri pengolahan dan pertambangan (marmer), pemerintah harus tetap memperketat regulasi mengenai tata ruang dan lingkungan hidup agar pembangunan ekonomi tidak mengorbankan daya dukung alam, terutama di wilayah pesisir selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung. (2025). *Kabupaten Tulungagung Dalam Angka 2025*. Tulungagung: BPS Kabupaten Tulungagung.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung. (2025). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tulungagung Menurut Lapangan Usaha 2020-2024*. Tulungagung: BPS Kabupaten Tulungagung.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2026). *Berita Resmi Statistik: Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Triwulan IV-2025*. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.
- Blakely, E. J., & Leigh, N. G. (2010). *Planning Local Economic Development: Theory and Practice*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Porter, M. E. (2000). *The Competitive Advantage of Nations*. New York: Free Press.
- Richardson, H. W. (1973). *Regional Growth Theory*. London: Macmillan.
- RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029
- Sjafrizal. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Rajawali Pers.
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduouse
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Economic Development*. Essex: Pearson Education.
- Tarigan, R. (2015). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Bumi Aksara.
- Widodo, T. (2006). *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN